

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES BATU

Oleh: Niko Wahyu Anggriawan

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl.MT Haryono 193 Malang

email : niko.anggriawan12@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba seperti di kalangan remaja atau mahasiswa semakin memprihatinkan, karena bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas penyalahgunaannya semakin meningkat yang dimungkinkan berdampak meluas, bukan hanya bagi diri sendiri namun dapat mempengaruhi anggota masyarakat lain. Upaya-upaya / langkah hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini Satuan Narkoba Polres Batu bertujuan untuk menekan / meminimalisir pelaku tindak pidana narkoba menjalankan aksinya. Dikarenakan dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat besar diantaranya adalah kerusakan jasmani maupun pikiran akibat penggunaan narkoba dan obat - obatan terlarang odalam jangka panjang serta kemunduran moral generasi penerus bangsa yang berdampak pada terkikisnya nilai-nilai luhur budaya bangsa dan melemahkan ketahanan nasional.

Kata kunci: narkoba, kepolisian, penyidikan

Abstract

Drug abuse such as teenagers or students is increasingly alarming, because not only in terms of quantity, but also in terms of quality, the abuse is increasing which is possible to have a widespread impact, not only for themselves but can influence other community members. Legal efforts / steps taken by the police in this case the Batu Police Narcotics Unit are aimed at suppressing / minimizing narcotics criminals carrying out their actions. Due to the enormous impact of abuse and illicit trafficking in narcotics, including physical and mental damage due to the use of narcotics and illegal drugs in the long term and moral decline of the next generation which has eroded the noble values of national culture and weakened national security.

Keywords: narcotics, police, investigation

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan keterbukaan ini masyarakat perlahan tapi pasti mengalami perubahan baik dibidang intelektual, moral maupun budaya yang didapatkan melalui interaksi dengan komunitas luar negeri. Hal tersebut diakibatkan oleh cepatnya arus informasi dan komunikasi melalui internet sehingga nilai - nilai baru masuk tanpa adanya penyaring/ filter sehingga seluruh hal - hal baru baik yang bersifat positif maupun negatif tidak dapat dibendung. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir serta gaya hidup masyarakat yang semakin bermacam-macam, salah satu diantaranya adalah penggunaan narkoba sebagai obyek dari kebutuhan yang harus dipenuhinya, meski untuk memenuhinya dengan cara-cara melanggar norma hukum yang berlaku.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Pada kenyataanya, kejahatan narkoba memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional dan digolongkan pada kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*). Masalah ini melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan akan berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional suatu bangsa. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perkembangannya hingga saat ini

penyalahgunaan penggunaan narkoba tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan berbagai lapisan masyarakat. Namun yang patut mendapat perhatian lebih adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif.¹

Dengan diratifikasinya Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang tertuang pada UU Nomor 07 Tahun 1997 dan kemudian diperbarui dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerjasama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu memberikan efek deteren / pencegahan serta efek gentar terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika dan psikotropika tersebut. Efektifitas Undang-Undang sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara sosiologis. Lokasi Penelitian yang berada di Polres Batu lebih tepatnya pada Satuan Reserse Narkoba sebagai pengemban fungsi penegakkan hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat - Obatan Terlarang. Dalam hal ini peneliti berusaha memperoleh data dari Penyidik maupun Penyidik pembantu Sat Narkoba terkait jalannya penyidikan Tindak Pidana tersebut. Sumber Data Penelitian berasal dari sumber data primer. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan antara lain; (1) Teknik observasi yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan. (2) Teknik Dokumentasi. (3) Teknik wawancara. Teknik Analisa Data yaitu Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

¹<http://ferli1982.wordpress.com/2014/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di-indonesia/>, diakses tanggal 26 Mei 2019

²Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

PEMBAHASAN

Pengertian Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 1 butir (1) yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dari pengertian di atas maka yang melakukan tugas sebagai penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)³.

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik yang berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman harus terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi⁴

Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.⁵

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Narkotika telah ditentukan, yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan
- b. Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan, dalam hal ini adalah Direktorat Bea dan Cukai.⁶

³ Hamzah, Andi. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 80-81.

⁴Tri Jata Ayu, S.H., “Bolehkah Penyidik Kepolisian bukan Sarjana Hukum”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5523a26b54324> diakses tanggal 31 Mei 2019 Pukul 20.00 WIB

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

⁶ Pasal 82 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan membawa konsekuensi semakin profesionalnya aparat penyidik dari Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah psikotropika yang diberi wewenang khusus untuk itu.

Pemberian wewenang ini dengan tetap memperhatikan fungsi koordinasi dengan penyidik dari Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang fungsinya sebagai pemegang utama wewenang dalam penyidikan tindak pidana. Penyidikan sejajar dengan pengertian pengusutan yang berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang, segera setelah mereka dengan jalan apapun mendapat kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Sedangkan menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 1 butir (2) menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka proses penyidikan di atas dibuat secara tertulis yang untuk selanjutnya diberkaskan dalam satu bandel berkas. Selanjutnya apabila penyidikan dianggap sudah selesai barulah berkas perkara dikirimkan kepada penuntut umum, berikut tersangka dan barang bukti. Jika oleh penuntut umum dianggap telah cukup maka tugas dan wewenang penyidik telah selesai. Sedangkan jika menurut penuntut umum masih terdapat kekurangan, maka penyidik harus melengkapi kekurangan tersebut. Untuk meringankan beban penyidik, pada KUHAP juga telah diatur adanya penyidik pembantu, yakni Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wewenang penyidik pembantu hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara juga tidak langsung diserahkan kepada Penuntut Umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan acara pemeriksaan singkat.

Pejabat polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara-perkara Pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, hal ini telah diatur pada UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Dalam pada itu, untuk mendukung tugas Kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula di dalam KUHAP kewajiban dan wewenang Pejabat Polisi dalam kegiatan penyidikan. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

Untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang optimal di dalam proses penyidikan perkara tindak pidana, serta menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan seperti misalnya tuntutan pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi, atau bahkan sampai dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan dan tuduhan hukum sebagai akibat dari keteledoran dari penyidik, maka tiap Pejabat Polisi yang melaksanakan tugas penyidikan harus memegang teguh dan menjalankan semua asas-asas dalam penyidikan antara lain:

- a. **Asas tujuan**, artinya proses penyidikan Polri dilaksanakan untuk menjamin tujuan penyidikan yang profesional dan mandiri;
- b. **Asas keterbukaan**, artinya penyidik Polri bekerja sesuai dengan prinsip keterbukaan, menerima saran dan / atau kritikan yang bersifat konstruktif dari pihak manapun;
- c. **Asas akuntabilitas**, artinya pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik Polri harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. **Asas kepentingan umum**, artinya penyidik Polri lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan / atau golongan;

- e. **Asas proporsionalitas**, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa memperhatikan prinsip kecepatan, ketepatan, dan keseimbangan;
- f. **Asas responsif**, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa mempedomani prinsip ketanggapsegeraan;
- g. **Asas kredibilitas**, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didasarkan pada fakta hukum yang akurat dan dapat dipercaya
- h. **Asas kerahasiaan**, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa memegang rahasia penyidikan yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
- i. **Asas kemitraan**, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjalin kemitraan dengan sesama penegak hukum demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara

3. Penyidikan Narkotika Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009

Penyidikan dalam undang-undang No.35 Tahun 2009 diatur dalam pasal :

Pasal 73

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 74

(1)Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

(2)Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 83

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 84

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 85

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polres Batu

Guna mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan rencana kerja dan program anggaran Satuan Narkoba Polres Batu yang telah ditentukan, maka perlu dirumuskan tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan tindak pidana narkotika secara jelas fungsi, tugas dan peranan Satuan Narkoba sesuai dengan jabatan organisasi dan tata kerja yang ada. Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh anggota Satuan Narkoba Polres Batu dalam melaksanakan tugas.

Dalam pelaksanaan tugas dilapangan guna mengungkap jaringan maupun pelaku tindak pidana narkotika khususnya di wilayah Kota Batu, sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Satuan Narkoba Polres Batu dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dapat dijelaskan sebagai berikut.

Proses Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika :

- a. Mencari dan mengumpulkan informasi / sumber informasi dari masyarakat.
- b. Membuat laporan informasi.
- c. Menerbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan.
- d. Membuat rencana kegiatan penyelidikan.
- e. Melaksanakan kegiatan penyelidikan sesuai waktu yang ditentukan.
- f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan.

- g. Ketika berhasil menangkap tersangka beserta barang bukti kemudian menyerahkannya ke unit sidik Sat. Narkoba Polres Batu.
- h. Melakukan gelar perkara bersama Kasat, KBO, unit lidik dan sidik.
- i. Dari hasil penangkapan dan penyitaan barang bukti selanjutnya dilakukan pengembangan ke jaringan dan atau sindikatnya.

Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika :

- a. Melakukan gelar perkara bersama Kasat, KBO, unit lidik dan sidik.
- b. Menerbitkan Laporan Polisi (LP).
- c. Melaporkan ke Satuan Atas (Dir. Narkoba Polda Jawa Timur).
- d. Memeriksa saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- e. Melengkapi administrasi penyidikan dan membuat berita acara semua tindakan yang dilakukan oleh unit lidik dan sidik.
- f. Mengambil sample urine, darah dan menimbang barang bukti serta menyisihkan sebagian barang bukti untuk kepentingan Labfor.
- g. Menyiapkan administrasi / surat-surat ke Kejaksaan, PN, dan Labfor
- h. Membuat dan mengirim surat ke PERADI Malang guna permintaan penasihat hukum.
- i. Mengambil hasil pemeriksaan ke Labfor.
- j. Memeriksa saksi ahli yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- k. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- l. Penerbitan dan Pengiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
- m. Mengirim berkas tahap I.
- n. Melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- o. Mengirim berkas tahap II.
- p. Mengikuti proses peradilan hingga mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam menyikapi hambatan yang terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika, kebijakan hukum yang dilakukan oleh Polres Batu antara lain sebagai berikut :

1. Mengadakan Forum *Crime Justice System* (CJS) yang mana didalamnya terdapat unsur-unsur penegak hukum antara lain dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan guna memudahkan koordinasi dalam penanganan tindak pidana narkotika.
2. Melakukan penunjukan personil yang berperan / memiliki kewenangan sebagai koordinator pengawas (korwas) dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.
3. Melakukan pembentukan pengawas penyidikan tindak pidana narkotika yang didalamnya beranggotaan kasi was, kasi propam dan ka subag hukum Polres Batu.
4. Melakukan gelar perkara terhadap tindak pidana yang sedang ditangani baik dalam skala kecil (dalam hal ini dilakukan oleh unit) maupun dalam skala besar (melibatkan fungsi / satuan lain).
5. Dalam penanganan tindak pidana narkotika khusus untuk korban anak-anak / remaja dilakukan pembinaan (rehabilitasi) dengan selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BNN Kota Batu.

PENUTUP

Dalam Penelitian terkait pelaksanaan tindak pidana Narkotika Di Polres batu tahun 2016 -2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dari segi kualitatif (tingkat kecenderungan penyalahgunaan maupun modus operandi prederan), maupun dari segi Kuantitatif (Banyaknya tersangka, barang bukti yang diamankan). Dengan berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di masyarakat yang telah jelas mengatur prosedur penyelidikan, penyidikan maupun ancaman pidana bagi penyalahguna maupun pengedar narkotika Nyatanya tidak mengurangi niatan masyarakat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika. Terbukti dengan data yang diperoleh dari penelitian di Polres Batu selama kurun

waktu 3 (tiga) tahun terakhir cenderung meningkat.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kemampuan serta profesionalitas penyidik menghadapi tantangan ke depan yang semakin sulit dan kompleks, perlu adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan dalam hal ini lembaga - lembaga yang tergabung dalam *criminal justice system* (CJS) yaitu Kepolisian, BNN, Kejaksaan dan Pengadilan dalam menangani tindak pidana Narkotika. Selain itu perlu diadakannya pelatihan kepada penyidik maupun penyelidik tindak pidana Narkotika untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggulangi dan meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang semakin hari semakin bervariasi dan kompleks modus operadanya. Selain itu perlu juga diadakan sosialisasi baik oleh BNN Kota maupun Kepolisian Resor Batu kepada masyarakat terkait bahaya dan ancaman pidana Tindak Pidana Narkotika sehingga masyarakat dapat paham dan berpikir secara logis untuk menjauhi tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ana Rokhmatussa'diyah., Suratman. 2017. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Parluhutan, Pitumorang, dkk., 2010. *Jurus-Jurus Berinvestasi Saham Untuk Pemula*, Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka.
- Rai Widjaya. 2002. *Hukum Perusahaan*. Jakarta : Kesaint Blanc.
- Rudhi Prasetya. 2014. *Perseroan Terbatas (Teori dan Praktek)*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*,. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Sally Putri. 2014. "*Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelian Kembali (buyback) Saham Perusahaan Publik Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*" . Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal